

PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Putri Retno Handayani¹⁾, M. Agus Sudrajat²⁾.

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, universitas PGRI Madiun
putriretnohandayani89@gmail.com.

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, universitas PGRI Madiun
agus.sudrajat@gmail.com

Abstrak

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah mengacu pada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dan pencapaian tujuan organisasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara implementasi akuntansi sektor publik dan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Jenis penelitian termasuk penelitian kuantitatif dengan pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS 25. Populasi dan sampel penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Madiun yang berjumlah 60 orang. Metode pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan Regresi Linear Berganda *Moderating Regression Analisis* (MRA). hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Variabel Implementasi Akuntansi Sektor Public dan Variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Kata kunci : akuntansi sektor public, kualitas laporan keuangan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Abstract

The accountability of local government agency performance refers to the ability to account for the use of public resources and the achievement of organisational goals in enhancing transparency, accountability, and the effectiveness of public financial management. The purpose of this study is to determine the influence of the internal control system as a moderating variable in the relationship between the implementation of public sector accounting and local government financial reports on the accountability of local government agency performance. This study is a quantitative research, with data processing using IBM SPSS 25. The population and sample of this

study consist of 60 employees of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Madiun Regency. The sample selection method used is purposive sampling. Data analysis was conducted using Multiple Linear Regression and Moderating Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that the variables of Public Sector Accounting Implementation and Financial Report Quality have a positive and significant influence on the Accountability of Local Government Agency Performance. The internal control system is capable of being a moderating variable in the influence of public sector accounting implementation and the quality of local government financial reports on the accountability of local government agency performance.

Keywords: public sector accounting; quality of financial statements; Accountability for local government performance.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan elemen vital dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Penerapan akuntansi sektor publik dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas menjadi faktor krusial yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan akuntabilitas. Konsep akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berkaitan erat dengan kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dan pencapaian tujuan organisasi. Akuntabilitas ini memastikan pemerintah daerah bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, serta mampu menghasilkan output yang diharapkan. Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas tinggi dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja lembaga pemerintah daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dengan jumlah yang mencapai Rp 8,97 triliun. Temuan ini tercantum dalam "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester" (IHPS) yang disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, menurut laporan *Pekanbaru Forum News*, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menghadapi tantangan dalam mencapai targetnya, yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 697,1 miliar.

Di Kabupaten Madiun, Badan Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada pelaksanaannya kurang mencapai hasil optimal dalam mencapai target tahunan dan eksplorasi sumber pendapatan alternatif yang potensial. Situasi ini menunjukkan perlunya penelitian lebih mendalam untuk memahami apakah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, sebagai sebuah kasus telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan akuntansi sektor publik yang efektif dapat membantu lembaga pemerintah seperti Bapenda dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, termasuk dalam hal transparansi pengelolaan dan pelaporan keuangan.

1. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Penerapan akuntansi sektor publik oleh pemerintah daerah merupakan langkah kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik (Akintoye & Skelcher, 2017). Melalui penerapan akuntansi sektor publik, pemerintah daerah dapat memperbaiki standar akuntansi, mengadopsi praktik terbaik, dan memperkuat proses pelaporan keuangan.

Menurut Zulfia, M. (2019), kualitas laporan keuangan pemerintah mencakup keandalan, relevansi, keterbandingan, keterbacaan, dan ketepatan waktu dalam menyediakan informasi keuangan yang dapat diandalkan bagi pengguna laporan tersebut.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah merujuk pada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dan pencapaian tujuan organisasi (Siahaan et al.). Akuntabilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil serta mencapai hasil yang diharapkan.

Sistem pengendalian internal adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk memastikan efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku (Chen et al., 2017). Dalam konteks ini, sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi

dapat mempengaruhi hubungan antara penerapan akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Implementasi Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Implementasi Akuntansi Sektor Publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Peilouw et al., 2023). Implementasi yang baik dari akuntabilitas kinerja dan sektor publik dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah dapat mengelola sumberdaya dengan lebih efisien.

H₁ : Implementasi akuntansi sektor publik memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang positif dan penting terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah (Rafarni Gea et al., 2021). Laporan keuangan yang berkualitas tinggi mencerminkan tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, ketika informasi keuangan disajikan secara jelas dan rinci kepada publik, masyarakat dapat memahami penggunaan dana publik, sehingga mengurangi keraguan terhadap penyalahgunaan atau ketidakefisienan dalam penggunaan dana tersebut.

H₂: Kualitas laporan keuangan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Akuntansi Sektor Publik

Dalam konteks ini, sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi dapat

mempengaruhi hubungan antara penerapan akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, karena aturan terkait telah ditetapkan melalui SPIP dan terus diterapkan, pengaruhnya akan semakin besar. Faktor yang paling berpengaruh dalam penerapan akuntansi sektor publik. (Pebriani, 2024).

H₃: Pengendalian intern memoderasi hubungan implementasi akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

System Pengendalian Intern memoderasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

(Nurul Fathia, 2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Karena ketika ditemukan masalah dalam laporan keuangan, sistem pengendalian internal akan menjadi tolok ukur pertama, sehingga peran sistem pengendalian internal akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

H₄: Sistem pengendalian intern mampu memoderasi kualitas laporan keuangan pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei untuk merancang penelitian kuantitatif. Metode ini memungkinkan pengumpulan data dari departemen lembaga pemerintah daerah melalui pembagian kuesioner atau menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Objek survei dalam penelitian ini adalah staf Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Madiun, sebanyak 60 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling.

Pengujian variabel adalah sebagai berikut: Akuntansi sektor publik adalah proses pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan entitas sektor publik (seperti pemerintah dan lembaga publik lainnya). Variabel penerapan akuntansi sektor publik diukur dengan Value of Money, dengan indikator mencakup: kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, perencanaan

dan informasi wewenang, keberlanjutan organisasi, hubungan masyarakat, serta fakta dan sumber data. Pengukuran variabel ini mengacu pada (Fedrinawati, 2017).

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Variabel kualitas laporan keuangan diukur menggunakan karakteristik kuantitatif, yang mencakup 4 indikator: relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Metode pengukuran variabel ini mengacu pada (Fedrinawati, 2017).

Akuntabilitas kinerja merujuk pada kewajiban lembaga pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Indikator pengukuran variabel akuntabilitas kinerja pemerintah mencakup: penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan pemanfaatan informasi. Metode pengukuran variabel ini mengacu pada (Fedrinawati, 2017).

Sistem pengendalian internal lembaga pemerintah bertujuan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam pencapaian tujuan organisasi. Variabel moderasi sistem pengendalian internal diukur menggunakan SPIP, dengan indikator meliputi: lingkungan pengendalian, manajemen keuangan, aktivitas pengendalian informasi, komunikasi, dan pengawasan. Metode pengukuran variabel ini mengacu pada (Fedrinawati, 2017).

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik statistik, termasuk analisis regresi berganda, dan teknik Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji hubungan antara variabel independen, variabel moderasi, dan variabel dependen. akan digunakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS 25.

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000

	Std. Deviation	1.39560619
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.118
	Negative	-.113
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.071 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig untuk variabel penerapan akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah adalah $0,071 > 0,05$, sehingga data penelitian ini terdistribusi normal.

b. Uji Multi

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Implementasi Akuntansi Sektor Public	.656	1.921
	Kualitas Laporan Keuangan	.556	1.970

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada dua variabel independen dalam penelitian ini, yaitu penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan, *Tolerance Value* (TV) $> 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Oleh karena itu, kedua variabel independen ini tidak mengalami multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1(Constant)	-8.290E-16	.709		.000	1.000
	Implementasi Akuntansi Sektor Public	.000	.042	.000	1.000
	Kualitas Laporan Keuangan	.000	.065	.000	1.000
	Sistem Pengendalian Intern	.000	.081	.000	1.000

a. Dependent Variable: Abs_Res

Berdasarkan hasil tabel heteroskedastisitas di atas, dapat dijelaskan bahwa semua variabel independen, yaitu penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan, memiliki nilai Sig yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, semua variabel independen tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Change Statistics		F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
	R Square	Change					
1	.873		671.835	3	56	.000	2.012

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan, Implementasi Akuntansi Sektor Publik

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel di atas, nilai Durbin-Watson (DW) adalah 2,012. Nilai ini dibandingkan dengan nilai signifikansi 5% untuk sampel sebanyak 60 dan jumlah variabel independen sebanyak 2, sehingga nilai DU adalah 1,484 (sumber nilai DU dapat ditemukan dalam lampiran Durbin-Watson). Oleh karena itu, nilai DW sebesar 2,012 lebih besar dari batas atas DU yaitu 1,484 dan kurang dari (4 - DU) yaitu 4 - 1,484 = 2,516. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami masalah autokorelasi.

e. Analisis linear berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1(Constant)	4.098	1.012		4.049	.000
Implementasi Akuntansi Sektor Publik	.615	.178	.462	3.450	.001
Kualitas Laporan Keuangan	.335	.087	.516	3.853	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel, persamaan garis regresi berganda yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e_i$$

$$\hat{Y} = 4,098 + 0,615X_1 + 0,335X_2 + e_i$$

- a. Konstanta = 4,098. Nilai konstanta sebesar 4,098 ini menunjukkan bahwa jika penerapan akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan, dan ϵ dianggap sebagai konstanta (nol), maka akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah adalah 4,098.
- b. Koefisien $b_1 = 0,615$ berarti jika penerapan akuntansi sektor publik meningkat satu poin sementara variabel independen lainnya tetap, maka akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,615 poin.
- c. Koefisien $b_2 = 0,335$ berarti jika kualitas laporan keuangan meningkat satu poin sementara variabel independen lainnya tetap, maka akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,335 poin.

f. Uji MRA (*Moderated Regression Analysis*)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.983	.380		5.218	.000
	Implementasi Akuntansi Sektor Publik	.304	.068	.420	4.477	.000
	Kualitas Laporan Keuangan	.359	.085	.348	4.221	.000
	Sistem Pengendalian Intern	.477	.093	.644	5.131	.000
	X1Z	.381	.011	.329	3.465	.000
	X2Z	.028	.009	.294	3.165	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel, persamaan garis regresi berganda yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_4Z + b_5X_1*Z + b_6X_2*Z + e_i$$

$$\hat{Y} = 1,983 + 0,304X_1 + 0,359X_2 + 0,477Z + 0,381X_1*Z + 0,028X_2*Z + e_i$$

g. Pengujian hipotesis

Dalam menguji hipotesis ini, telah dilakukan uji statistik T dan uji hipotesis R^2 . Berikut adalah uji statistik T:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.983	.380		5.218	.000
	Implementasi Akuntansi Sektor Publik	.304	.068	.420	4.477	.000
	Kualitas Laporan Keuangan	.359	.085	.348	4.221	.000
	Sistem Pengendalian Intern	.477	.093	.644	5.131	.000
	X1Z	.381	.011	.329	3.465	.000
	X2Z	.028	.009	.294	3.165	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis data dari formula 1 di atas, hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pada variabel penerapan akuntansi sektor publik (X1), $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $4,477 > 2,00$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah. Artinya, semakin baik penerapan akuntansi sektor publik, semakin tinggi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah, sehingga **hipotesis pertama diterima**.
- 2) Pada variabel kualitas laporan keuangan (X2), $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $4,221 > 2,00$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah. Artinya, semakin baik kualitas laporan keuangan, semakin tinggi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah, sehingga **hipotesis kedua diterima**.
- 3) Pada variabel $X1*Z$, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,465 > 2,00$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat berfungsi sebagai variabel moderasi dalam pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap

akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah, sehingga **hipotesis ketiga diterima**.

- 4) Pada variabel $X2*Z$, nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $3,165 > 2,00$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat berfungsi sebagai variabel moderasi dalam pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah, sehingga **hipotesis keempat diterima**.

Dan Berikut ini uji hipotesis R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.939 ^a	.883	.881	1.16422

a. Predictors: (Constant), $X2Z$, Implementasi Akuntansi Sektor Public, Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, $X1Z$

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel di atas, nilai R kuadrat yang telah disesuaikan adalah 0,881, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi, adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R_y^2 \times 100\% &= 0,881 \times 100\% \\ &= 88,1\% \end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi, pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah adalah sebesar 88,1%, sementara sisanya 11,9% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak diteliti dalam studi ini.

Penelitian ini membahas pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja

lembaga pemerintah daerah, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi, sebagai berikut:

1. Pengaruh implementasi akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis data uji t, variabel penerapan akuntansi sektor publik (X1) menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, yaitu $4,477 > 2,00$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah. Artinya, semakin baik penerapan akuntansi sektor publik, semakin tinggi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah, sehingga **hipotesis pertama diterima**.
2. Pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis data uji t, pada variabel kualitas laporan keuangan (X2) diperoleh hasil $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, yaitu $4,221 > 2,00$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah. Artinya, semakin baik kualitas laporan keuangan, semakin tinggi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah, sehingga **hipotesis kedua diterima**.
3. Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis data uji MRA, variabel $X1*Z$ menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, yaitu $3,465 > 2,00$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat berfungsi sebagai variabel moderasi dalam

pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah, sehingga **hipotesis ketiga diterima**.

4. Pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis data uji MRA, pada variabel $X_2 * Z$ diperoleh hasil $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, yaitu $3,165 > 2,00$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat berfungsi sebagai variabel moderasi dalam pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah daerah, sehingga **hipotesis keempat diterima**.

D. SIMPULAN

Variabel implementasi akuntansi sektor publik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Selain itu, variabel kualitas laporan keuangan juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Lebih lanjut, sistem pengendalian intern terbukti mampu menjadi variabel moderasi pada pengaruh implementasi akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Selain itu, sistem pengendalian intern juga mampu menjadi variabel moderasi pada pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

E. SARAN

Saran pada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel bebas lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan variabel bebas yang tidak diteliti tersebut dapat memberikan hasil yang berbeda. Dan mengambil sampel penelitian dan objek penelitian yang

berbeda sehingga diperoleh hasil yang berbeda. Serta menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak sehingga hasil penelitian akan menjadi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mudrikah, F., & Ali, K. (2020). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Fidusia*, 3(2), 166–182. www.Opsi.id,
- Peilouw, C. T., Oktavia, D. D., Wulandari, A. A., & Latuan, C. F. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 111–112. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9641>
- Rafarni Gea, I., Studi Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Korespondensi Ilmi Rafarni Gea, P. (2021). SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. 1(1), 2–10. <https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai>
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.135>
- Zulfia, M. (2019). The Effect of Accounting System, Internal Control System, and Competence of Human Resources on the Quality of Local Government Financial Statements (Empirical Study on the City Government of Payakumbuh, Indonesia). *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 3(5), 157-165
- Widaryanti, W., & Pancawardani, N. L. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(2), 477–492. <https://doi.org/10.34152/fe.15.2.477-492>
- , M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan DanaDesa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Ahmed, A. A., & Usman, Z. (2023). TRIALABILITY AND OBSERVABILITY OF ACCRUAL BASIS INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING

STANDARDS IMPLEMENTATION IN NIGERIA. *Gusau Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 35–53. <https://doi.org/10.57233/gujaf.v4i1.199>

Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 4(2), 104. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7668>.

Oktavianto, M. R. (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6, 994–1001. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya994>

Pebriani, R. A. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *10*(1), 55–62

Pranaswati, H. V., & Kiswanto. (2020). Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(3), 273–289. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i3.2862>

Suryono, B. (n.d.). PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH. 2

Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in Sou. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 811–818. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>

Aldi Putra, M., Taufik, T., & Aunnurrafiq, A. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 4(1), 31–41. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v4i1.103>

Angelita, S., & Saifhul, A. (2022). Determinan Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kota Banjarmasin dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. | *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC*, 1(1), 286–302.